

**KAJIAN PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
DESA HUTAN (PMDH) DI PAPUA**  
*(A Study on the implementation of Forest Village Community  
Establishment in Papua)*

Oleh / By :  
Irma Yeny & Henry Silka Innah<sup>1)</sup>

**ABSTRACT**

*After the Decree of Forestry Minister No. 523/Kpts-II/1997 on Forest Village Community Establishment was canceled, The Implementation of Forest Village Community Establishment (PMDH) in Papua becomes ineffective. The purposes of this study are describing the Establishment of the Forest Village Community and offering another pattern of PMDH which is suitable for Papuans conditions. The research was conducted in several villages around timber company area, and the method used in this research is mapping analysis on effectiveness relationship of PMDH implementation.*

*The results of the research are as following: Firstly, because at least 93.29% of people around IUPHHK (Timber Company) is gatherers, Timber Company must be able to conduct PMDH in their operation period to increase life quality of the community; Secondly, the composition of compensation fund for community must be formulated, because cash value that was given by company is less than 'UMR' (Minimum Regional Salary Rate) of Papua Province; Thirdly, Forestry Minister Decree No. 177/Kpts-II/2003, on Criteria and Indicator of Sustainable Forest Management must be supported by dissemination and integration of program amongst stakeholders, because timber company does not have the capacity to do all duties to empower local community.*

*Keywords : Empowerment, Establishment, Community Village, Forest, PMDH, Compensation Fund, Papua*

**ABSTRAK**

Sejak tidak berlakunya SK Menhut No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, maka pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan di Papua menjadi tidak jelas. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan di Papua melalui IUPHHK dan mengemukakan pola pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat Papua. Penelitian dilakukan di desa-desa sekitar kawasan hutan produksi di Papua, yang bersinggungan dengan batas wilayah beberapa IUPHHK dan merupakan sasaran kegiatan PMDH. Metode yang digunakan ialah metode analisis peta hubungan efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PMDH di Papua yang berjalan sejak tahun 1998 sebagai berikut; Pertama, kehadiran IUPHHK harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dengan tetap melaksanakan pola PMDH, karena 93,29% penduduk adalah petani meramu yang masih memerlukan pendampingan ke arah pertanian menetap; kedua, pemberian kompensasi perlu diformulasi kembali, mengingat nilai uang tunai yang diperoleh masih lebih rendah dari UMR (Upah Minimum Regional) di Papua; Ketiga, Pelaksanaan SK Menhut No. 177/Kpts-II/2003, tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari harus didukung dengan kegiatan sosialisasi dan integrasi program dengan instansi pemerintah dan LSM yang bekerja di sekitar lokasi IUPHHK, oleh sebab IUPHHK tidak dapat mengambil alih semua tugas pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci : Pemberdayaan, Pembinaan, masyarakat, Desa Hutan, PMDH, Dana Kompensasi, Papua

---

<sup>1)</sup> Peneliti pada Puslitsosek, alamat Jl. Gunung Batu 5 Bogor e-mail :

## I. PENDAHULUAN

Sekitar 25 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu ditingkatkan harkat kehidupan sosial ekonominya ke tingkat yang layak. Di Propinsi Irian Jaya Barat yang merupakan Propinsi termuda di Indonesia memiliki rumah tangga miskin sebanyak 128.156 atau 75% dari 170.049 rumah tangga (BPS. 2006). Umumnya mereka berada di desa-desa tertinggal di dalam dan sekitar hutan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan kehutanan yang berkelanjutan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa seharusnya mendapat prioritas yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong dan mendukung program nasional pengentasan kemiskinan, pembangunan kehutanan menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu sasaran utama. Pemerintah melalui Menteri Kehutanan telah mengeluarkan kewajiban pemberdayaan masyarakat sekitar hutan kepada pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) melalui Hak Pengusahaan Hutan Bina Desa melalui SK Menhut No. 671/Kpts-II/1991 selanjutnya program tersebut diganti dengan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) melalui SK Menhut 523/Kpts-II/1997.

Kewajiban pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan tersebut telah dilengkapi dengan biaya satuan yang mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 165/Kpts-II/1998 dimana besarnya biaya satuan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan sebagai gerakan moral kepedulian sosial bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang disesuaikan dengan besarnya realisasi produksi kayu bulat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tebangan 2 (dua) tahun sebelumnya (tahun tebangan minus dua) yaitu minimal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) tiap m<sup>3</sup>.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran PMDH maka setiap pemegang HPH dan pemegang HTI wajib melaksanakan kegiatan PMDH dengan jumlah minimal 2 desa untuk setiap tahun, dengan ketentuan bahwa setelah 20 tahun atau setengah jangka waktu hak pengusahaan hutan berakhir seluruh desa binaan areal kerjanya atau pedesaan di sekitar hutan terbina seluruhnya. Selanjutnya metode pelaksanaan, pelaporan dan sanksi diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan melalui Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No. 36/Kpts/IV-BPH/1998.

Di Papua sejak tahun 2000 upaya pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan dengan pola PMDH tetapi juga menggunakan pola kompensasi hak *ulayat* berdasarkan SK Gubernur Papua No 51 Tahun 2001 dan sejak Tahun 2004 biaya kompensasi mengacu pada SK Gubernur No.184 Tahun 2004.

Tahun 2005, pelaku ekonomi (HPH/HTI) tidak lagi dibebani dengan PMDH sesuai dengan Keputusan Menteri No. 4795/Kpts-II/2002 tentang pencabutan SK No. 523/Kpts-II/1997. Selanjutnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada HPH dan HTI mengacu pada Kepmen 177/Kpts-II/2003 tentang kriteria dan indikator usaha pengelolaan hutan secara lestari pada unit manajemen usaha pemanfaatan hutan tanaman. Keluarnya Kepmen tersebut membawa dampak pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Papua yang semakin tidak jelas. Sebagian IUPHHK masih menjalankan pola PMDH bersamaan dengan pelaksanaan dana kompensasi dan ada pula yang hanya menjalankan dana kompensasi. Kondisi ini menyebabkan semakin tidak jelasnya makna kehadiran IUPHHK bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Tulisan ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) di Papua serta pola pembinaan yang tepat untuk dilaksanakan di Papua sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

## II. METODOLOGI

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian meliputi masyarakat sekitar hutan produksi dimana secara administratif bersinggungan langsung dengan areal konsesi HPH dan merupakan sasaran pelaksanaan PMDH. Sedangkan lokasi HPH yang dituju terdapat pada 2 propinsi masing-masing tertuang dalam Tabel 1. Penelitian berlangsung selama 3 bulan pada bulan Agustus Oktober 2006.

Tabel 1. Lokasi Desa Contoh di Propinsi Papua

No.	Lokasi	HPH	Desa Contoh
1.	Kabupaten Fakfak	PT. Arfak Indra	1. Metimbers
			2. SP 5
2.	Kabupaten Raja Ampat	PT. Hanurata	3. Sakabu
			4. Sumate
			5. Kapatlap
			6. Kalobo
3.	Kabupaten Boven Digul	PT. Bade Makmur Orissa	7. Getentiri
		PT. Tunas Sawaerna	8. Aiwat
			9. Butiptiri
			10. Anggai
4.	Kabupaten Kaimana	PT. Centrico	11. Urubika
5.	Kabupaten Teluk Bintuni	PT. Wukitasari	12. Wagura I
6.	Kabupaten Sarmi	PT. Wapoga Mutiara Timber	13. Tawasari Maringgi
			14. Anus

### B. Prosedur Penelitian

#### 1. Pengambilan contoh

Dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah : (1) rumah tangga masyarakat sekitar, (2) perusahaan mitra usaha masyarakat sekitar hutan, (3) instansi pemerintah yang terkait. Pemilihan contoh rumah tangga masyarakat sekitar hutan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan pertimbangan : (1) desa yang ikut pola pemberdayaan, dan (2) desa yang tidak ikut pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (PMDH). Instansi pemerintah yang dijadikan contoh adalah yang terkait langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Masing-masing lokasi penelitian terdiri atas 2 (dua) desa (Tabel 1) yaitu desa yang ikut pola pemberdayaan dan desa yang tidak ikut pola pemberdayaan, sehingga total contoh sebanyak 14 desa. Untuk setiap desa, responden yang diambil berjumlah 15 rumah tangga. Dengan demikian total responden rumah tangga adalah 30 responden pada setiap wilayah penelitian. Jumlah ini merupakan lebih kurang 10% dari total kepala keluarga dalam satu desa. Karakteristik responden disajikan dalam lampiran 1.

## 2. Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada responden, juga pengamatan langsung ke lapangan. Bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian dengan teknik wawancara dan diskusi pada kepala keluarga dan responden kunci adalah *Quisitioner*. Sedangkan alat yang digunakan untuk kegiatan ini adalah alat tulis menulis, alat perekam dan dokumentasi.

Data primer yang dikumpulkan antara lain, (1) data penerimaan masyarakat, (2) Data penyerapan tenaga kerja, (3) Data distribusi penerimaan, (4) persepsi dan bentuk peran aktif masyarakat dalam mengelola hutan. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengutip/ menyerap data pada beberapa instansi pemerintah maupun swasta serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

## 3. Pengukuran Kontribusi Perusahaan Melalui Kegiatan Pemberdayaan

### a. Penerimaan

Besarnya penerimaan diukur berdasarkan penerimaan yang diterima oleh rumah tangga dan dianalisis berdasarkan sumbernya. Sumber penerimaan responden dimasukkan ke dalam 4 kategori, yaitu : (1) hasil hutan, (2) pertanian, (3) jasa perdagangan, dan (4) jasa lain (Astana, dkk., 2002). Penerimaan yang diukur adalah penerimaan rumah tangga yang diperoleh dari berbagai sumber dalam satu tahun terakhir. Perhitungan besarnya penerimaan penduduk per kapita per tahun dilakukan dengan cara membagi total penerimaan rumah tangga contoh dalam satu tahun dengan jumlah anggota keluarga rumah tangga contoh. Penerimaan per kapita merupakan penerimaan yang dimiliki oleh setiap anggota rumah tangga.

### b. Distribusi pengeluaran

Distribusi pengeluaran diukur dengan melihat persentase pengeluaran berdasarkan jenis pengeluarannya atau kemana saja penerimaan tersebut didistribusikan. Jenis Pengeluaran dikelompokkan kedalam 3 katagori kebutuhan yaitu : (1) Primer atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan pangan (beras, gula, kopi, dan kebutuhan makan lainnya), (2) Sekunder atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan sandang (pakaian, sekolah, hiburan), (3) tersier atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan papan atau kebutuhan konsumtif (rumah tinggal yang layak, perabotan rumah tangga, alat elektronik).

### c. Penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja dianalisis berdasarkan jumlah/persentase penduduk yang diserap oleh masing-masing pola pemberdayaan masyarakat yang dikelompokkan menjadi (1) lokal Papua, (2) lokal setempat. Dalam menganalisis berapa besar penyerapan tenaga kerja digunakan satuan persentase (%).

## C. Analisa Data

Penyajian dan pengolahan data penerimaan dilakukan secara tabulasi berdasarkan pada sumber penerimaan dan pengeluaran rumah tangga, serta besar penerimaan (pengeluaran) rumah tangga.

Penyerapan tenaga kerja dianalisis dengan membandingkan persentase penduduk yang bekerja pada setiap bagian dari kegiatan HPH. Efektifitas pola pemberdayaan dianalisa menurut peta hubungan (Alhamid dan Rizal, 1997) sebagai berikut :

(1) Penyerapan tenaga kerja Tinggi	X	Pendapatan Rendah
(2) Penyerapan tenaga kerja Rendah	X	Pendapatan Rendah
(3) Penyerapan tenaga kerja Rendah	X	Pendapatan Tinggi
(4) Penyerapan tenaga kerja Tinggi	X	Pendapatan Tinggi

Pola pemberdayaan pada desa binaan dianggap sudah efektif jika telah membentuk peta analisis ke (4).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Masyarakat Sekitar Hutan di Papua

##### 1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk 93,33% adalah petani peramu, nelayan dan buruh pada perusahaan (tabel 2). Sehingga sumber pendapatan penduduk dapat dikelompokkan menjadi unsur meramu hasil hutan (menangkap ikan, menokok sagu, berburu, mengumpulkan masoi, rotan dll), pertanian (menanam umbi-umbian, pisang, jagung, sayuran, pinang, kakao, kelapa), jasa perdagangan (membuka kios) dan terlibat dalam kegiatan kehutanan (tenaga kerja pada perusahaan/hutan rakyat).

Table 2. Distribusi Jenis Mata Pencaharian Responden

No.	Kabupaten Contoh	Jumlah KK	Jenis Mata Pencaharian				
			Petani	Peramu	Nelayan	Kehutanan	Jasa Perdagangan
1.	Kab. Fak-fak	30	18	6	1	3	2
2.	Kab. Raja Ampat	60	15	2	36	2	5
3.	Kab. Boven digul	60	26	21	8	2	3
4.	Kab. Kaimana	30	7	14	5	2	2
5.	Kab. Teluk Bintuni	30	10	12	5	1	2
6.	Kab. Sarmi	30	13	5	9	1	2
	Total	240	89	60	64	11	16
			224				
			93,33 %				6,66%

Pada umumnya penduduk melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tiap bulannya. Kondisi ini ditunjukkan dengan 13% penduduk yang mempunyai tabungan untuk keberlanjutan kehidupannya. Namun demikian untuk mengatasi kebutuhan uang yang mendesak penduduk pada umumnya berternak (babi, kambing, ayam) yang dapat dijual jika sewaktu-waktu membutuhkan uang. Oleh karena itu semakin banyak hewan ternak maka, keluarga tersebut dianggap mampu dari segi materi. Kabupaten yang cukup intensif dalam mengelola lahan pertaniannya adalah kabupaten Sarmi khususnya desa Tawasarimaringgi.

Dengan komoditi coklat dan kopra penduduk memiliki penghasilan yang cukup tinggi, bahkan sudah mampu menyekolahkan anak di kota propinsi papua.

Sumber pengeluaran terbesar pada setiap kabupaten terlihat pada barang konsumsi (primer) seperti barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (pakaian, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) dan kebutuhan dirinya seperti minyak rambut, sabun mandi, sabun cuci, rokok, bedak, sampo. Hanya penduduk di Kabupaten Fakfak, Raja Ampat dan Sarmi yang sudah mampu membeli barang besar yaitu barang-barang sekunder dan tersier seperti TV, Parabola, Radio.

Table 3. Distribusi Jenis Pengeluaran Responden

No.	Lokasi	Desa Contoh	Distribusi Pengeluaran		
			Primer	Sekunder	Tersier
1.	Kabupaten Fakfak	Metimbers	√	√	√
		SP 5	√		
2.	Kabupaten Raja Ampat	Sakabu	√	√	√
		Sumate	√	√	√
		Kapatlap	√	√	√
		Kalobo	√	√	√
3.	Kabupaten Boven Digul	Getentiri	√	√	
		Aiwat	√		
		Butiptiri	√		
		Anggai	√		
4.	Kabupaten Kaimana	Urubika	√	√	
5.	Kabupaten Teluk Bintuni	Wagura	√	√	
6.	Kabupaten Sarmi	Tawasari Maringgi	√	√	√
		Anus	√	√	

## 2. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian dari perilaku masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat sebagian penduduk masih melakukan ritual adat sebagai bukti masih kuatnya pengaruh adat pada wilayah tersebut khususnya dalam mengatur penggunaan lahan hutan. Ritual adat yang masih dilakukan secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah HPH khususnya dalam merubah pola pikir yang tradisional menjadi mandiri. Tabel berikut menunjukkan ritual adat yang masih di lakukan di masing-masing lokasi penelitian.

Tabel 4. Jenis Upacara Adat yang masih dilakukan

No.	Lokasi	Kelahiran	Kematian	Pembukaan Areal Hutan
1.	Kabupaten Fakfak	-	-	√
2.	Kabupaten Raja Ampat	-	-	√
3.	Kabupaten Boven Digul	-	-	√
4.	Kabupaten Kaimana	-	-	√
5.	Kabupaten Teluk Bintuni	√	√	√
6.	Kabupaten Sarmi	-	√	√

Keterangan : √ : dilakukan, - : tidak dilakukan

Ritual adat pada saat kelahiran sudah sangat jarang dilakukan, hal ini dipengaruhi peradaban agama yang sudah cukup berkembang di wilayah tersebut. Namun pada suku Kuri yang berada pada kampung Wagura distrik Sarbe kabupaten Teluk Bintuni masih melakukan ritual adat yang lama dengan menempatkan sang ibu yang akan melahirkan di sebuah gubuk tersendiri jauh dari rumah induk. Sampai sang anak berumur kurang lebih 3 bulan sang ibu dan bayi melalui pesta adat dapat di bawa kembali ke rumah. Ritual ini masih dilakukan sampai sekarang, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Yesus sang juru selamat lahir di kandang domba, bukan di dalam sebuah rumah yang megah. Sehingga penduduk yakin bahwa bayi yang baru lahir dan suci selayaknya berada pada tempat yang serupa dengan tempat kelahiran Yesus.

Ritual kematian masih dilakukan pada suku Kuri, Suku Bugu, suku Dani. Ritual tersebut masih dilakukan oleh penduduk yang menganut “agama tua” atau agama nenek moyang. Sedangkan penduduk yang beragama nasrani dan mengenal gereja sudah tidak lagi melakukannya.

Ritual kematian tersebut berbeda-beda, jika penduduk Suku Kuri meninggal maka jenazah dapat dikuburkan langsung, namun setelah 3- 5 tahun kuburan tersebut dibongkar untuk diambil tengkorak kepala. Melalui prosesi adat tengkorak tersebut diletakkan di goa yang terletak di bukit-bukit batu untuk kemudian dijadikan tempat bersemayamnya arwah-arwah. Tempat tersebut selanjutnya dikenal dengan tempat keramat. Suku Bugu di pedalaman Sarmi masih melakukan prosesi bayar kepala, dimana jika kepala keluarga penduduk suku Bugu meninggal dunia maka sang istri tidak boleh memotong rambutnya sampai dia mampu membayar sejumlah uang yang diminta oleh keluarga suami sebagai uang kepala. Jika dalam memenuhi jumlah uang yang diminta sang istri tidak mampu maka, saudara kandung sang istri harus mampu membayar lunas sejumlah uang tersebut. Berbeda dengan suku Dani melakukan ritual kematian dengan melakukan pemotongan jari. Jika dalam satu keluarga ada yang meninggal maka, sebagai tanda berduka sang istri harus memotong jarinya dan melumuri dirinya dengan arang selama 40 sampai 100 hari kematian.

Dalam pembukaan areal hutan untuk pemanfaatan komersil dan berskala besar maka, masih dilakukan ritual adat dalam bentuk sesajen dan pengucapan syukur. Ritual ini dilakukan dengan menyembelih ternak babi/kambing dan mengubur kepala ternak tersebut pada areal yang akan dimanfaatkan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap arwah

nenek moyang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa kemurkaan arwah-arwah nenek moyang selama kegiatan berlangsung.

## B. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

Dalam kegiatan PMDH terdapat 3 (tiga) pokok kegiatan yaitu : (1) Peningkatan pendapatan, tumbuhnya ekonomi masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan, (2) Penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi dan (3) menciptakan kesadaran dan perilaku positif dalam pelestarian SDA. Masing- masing kegiatan tersebut terdapat bagian-bagian kegiatan yang jika dilaksanakan dengan optimal memberikan pengaruh positif bagi kemajuan masyarakat sekitar hutan.

Beberapa HPH yang menjadi lokasi penelitian hanya melakukan sebagian dari jenis kegiatan yang terdapat dalam lampiran Kepmen No. 36/Kpts/IV-BPH/1998.

1. Kegiatan Peningkatan pendapatan, tumbuhnya ekonomi masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan

Pada bagian kegiatan ini, pelaku ekonomi memprogramkan kegiatan demplot pertanian berupa tanaman pangan dan hortikultura dan beberapa kegiatan lainnya seperti yang tertuang pada tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan Peningkatan Pendapatan oleh Pengusahaan Hutan

No.	Kegiatan	A	B	C	D	E	F	Keterangan
I.	Peningkatan Pendapatan, tumbuhnya ekonomi masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan.							
	1. Pendidikan dan Latihan Ketrampilann							
	a. Budidaya Tanaman Pangan		V				v	0,25 ha
	b. Budidaya Hortikultura		V				v	0,25 ha
	c. Budidaya Tanaman Kehutanan							
	d. Budidaya Lebah Madu							
	e. Budidaya Ternak							
	f. Budidaya Ikan							
	g. Pertukangan Kayu							
	h. Kerajinan patung, ukiran							
	i. Beasiswa (SD, SMP, SMA)	V	V	V	V		v	18 orang
	j. Honor Guru	V	V	V	V		v	1 orang
	k. Lain-lain (pembinaan Karang taruna dan kepemudaan)	V	V	V	V			
II.	2. Pemasaran Hasil							
	a. Pertanian/ Peternakan/Perikanan	V	V	V	V			
	b. Pertukangan/Kerajinan/Ukiran							
	3. Lain-lain							
III.	a. Pembentukan/pembinaan koperasi							
	b. Bantuan Modal kerja/ModalUsaha							
	c. Lain-lain/Bantuan Solar/oli					V	v	6.000 liter/ 180 liter

Sumber : Data Primer dari Sample HPH di Papua, 2006



Keterangan :

V : melaksanakan, - : tidak melaksanakan

A. PT. Arfak Indra, Fak-fak Irian Jaya Barat

B. PT. Korindo Grup, Bovendgul Papua

C. PT. Hanurata, Raja Ampat Irian Jaya Barat

D. PT. Wapoga Mutiara Timber, Sarimi Papua

E. PT. Centrico, Kaimana Irian Jaya Barat

F. PT. Wukirasari, Teluk Bintuni, Irian Jaya Barat

Pembuatan demplot dengan luasan rata-rata 0,25 ha ini merupakan kerjasama penduduk sekitar dan tenaga bina hutan yang ada di perusahaan. Dari demplot tersebut penduduk dapat mengetahui teknik bercocok tanam sesuai dengan kondisi tanah di wilayah tersebut. Selain itu demplot tersebut juga merupakan sumber benih bagi kebutuhan pertanian penduduk. Demplot pertanian yang sampai saat ini masih aktif dilakukan adalah demplot yang dilakukan oleh PT. Wukirasari di kabupaten Teluk Bintuni. Keberhasilan demplot tersebut tidak terlepas dari adanya tenaga bina hutan yang terstruktur dalam organisasi perusahaan dan didukung oleh tenaga sarjana yang berdedikasi tinggi. Selain kegiatan demplot, kampung yang memiliki karakteristik penduduknya sebagai peternak akan diberikan bibit ternak seperti babi, sapi dan ayam.

Jika perusahaan tidak terdapat tenaga bina hutan maka, kegiatan pembuatan demplot tidak dilaksanakan. Perusahaan memanfaatkan alokasi dana PMDH untuk memberikan solar gratis bagi penduduk yang membutuhkan. Solar tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar perahu motor yang merupakan alat transportasi menuju kota kabupaten.

Untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan lingkungan pihak perusahaan memberikan bantuan beasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa tersebut. Pemberian beasiswa diberikan pada penduduk yang sekolah di luar kampung dan mempunyai motivasi sekolah yang dianggap tinggi. Penentuan siswa penerima beasiswa di serahkan kepada keputusan kepala kampung.



Gambar. 1. Demplot Kacang Panjang, PT. Wukirasari, Kabupaten Teluk Bintuni

## 2. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan perusahaan dalam bentuk jalan, jembatan, perumahan penduduk, pasar, balai pertemuan desa, rumah ibadah, dan sarana kesehatan (tabel 6.).

Tabel 6. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No.	Kegiatan	A	B	C	D	E	F	Keterangan
I.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi							
	1. Bangunan fisik desa							
	a. jalan	V	V	V	V	v	V	
	b. Jembatan			V		v		
	c. Balai/Kantor desa/Perumahan	V	V	V	V		V	1 unit rumah pastor
	d. Pengairan							
	e. Air Bersih							
	f. Pos Yandu							
	g. MCK						v	6 unit
	h. Pasar							
	i. Lain-lain (penyediaan alat transportasi dan penerangan berupa motor jonson, genset dan seperangkat alat TV)	V	V	V	V	V	v	Bantuan instalasi listik dan cat
II.	2. Bangunan Fisik Keagamaan							
	a. Mesjid	V	V	V	V			
	b. Gereja	V	V	V	V		v	1 paket renovasi gereja
	c. Lain-lain/insentif guru jemaat						v	1 paket
IV.	3. Bangunan Fisik Pendidikan							
	a. Sekolah/Madrasah		V				v	2 paket
	b. Rumah Guru							
	c. Lain-lain							
V.	4. Pemanfaatan sarana/prasarana perusahaan							
	a. Poliklinik						v	3 paket obat2an
	b. Koperasi							
	c. Lain-lain/kunjungan medis						v	3 x /tahun

Sumber : Data Primer dari Sample HPH di Papua, 2006

Keterangan :

A. PT. Arfak Indra, Fak-fak Irian Jaya Barat  
 B. PT. Korindo Grup, Bovendgul Papua  
 C. PT. Hanurata, Raja Ampat Irian Jaya Barat

D. PT. Wapoga Mutiara Timber, Sarmi Papua  
 E. PT. Centrico, Kaimana Irian Jaya Barat  
 E. PT. Centrico, Kaimana Irian Jaya Barat

Pembuatan jalan dan jembatan merupakan bagian dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, yang dananya merupakan alokasi dana TPTI. Perumahan penduduk, sekolah, pasar, balai pertemuan, rumah ibadah dan sarana kesehatan merupakan sarana yang dibangun perusahaan dengan memanfaatkan dana PMDH. Pembangunan sarana tersebut di programkan dan dianggarkan menurut prioritas tingkat kebutuhannya. Melalui musyawarah penduduk dengan pihak perusahaan maka bentuk pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana PMDH pada tahun tersebut.

Selain pembuatan sarana fisik, perusahaan juga membantu masyarakat dalam bentuk penyediaan alat transportasi laut (motor tempel) serta prasarana penerangan berupa *genset* dan seperangkat TV yang dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan penyebaran informasi. Bentuk bantuan tersebut diberikan satu kali pada saat perusahaan mulai beroperasi sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat.

Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan seringkali tidak disertai dengan tenaga teknis. Sekolah yang memiliki tenaga pendidik letaknya jauh dari kampung. Hal ini mengakibatkan anak-anak usia sekolah (SD) tidak dapat bersekolah dengan baik mengingat bangunan sekolah yang ada di kampung mereka tidak mempunyai guru. Di lain pihak para orang tua tidak bersedia menyekolahkan anaknya keluar kampung karena dianggap masih kecil (usia SD). Kunjungan tenaga kesehatanpun jarang dilakukan oleh puskesmas terdekat. Kondisi ini mengakibatkan penduduk yang hidup di sekitar hutan dan jauh dari kota distrik akan terus ketinggalan dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Dari 6 (enam) HPH yang menjadi contoh, PT. Wukirasari merupakan HPH yang cukup konsisten dalam membina masyarakat desa hutan. Adanya struktur organisasi bina desa hutan yang jelas dan tegas dalam bidang-bidangnya menghasilkan kinerja pembangunan masyarakat desa hutan menjadi lebih baik. Pembangunan fisik yang terdapat di wilayah ini selalu disertai dengan tenaga teknis, yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Pengrekrutan tenaga guru, pastur, ustads dan tenaga medis perusahaan merupakan solusi bagi kebutuhan tenaga teknis yang tidak dapat di dipenuhi dari pemerintah setempat. Tenaga-tenaga tersebut didanai oleh perusahaan untuk mensukseskan pemberdayaan masyarakat sekitar HPH. Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan staff bina desa, lemahnya komitmen HPH lainnya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar HPH, pada umumnya di sebabkan tidak ada tenaga bina hutan yang khusus membidangi urusan tersebut. Jika ada tenaga seringkali komitmen pimpinan lemah sehingga staf bina hutan tidak mampu berkreasi dalam program-program pemberdayaan. Lemahnya komitmen perusahaan dalam membina masyarakat sekitar HPH disebabkan jauhnya jarak antara pemukiman masyarakat dan *camp* HPH sehingga dibutuhkan alokasi

### **3. Kegiatan Menciptaan kesadaran dan perilaku positif dalam pelestarian SDA**

Penciptaan kesadaran dan perilaku positif dalam pelestarian sumber daya alam tidak terlepas dari kegiatan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum dan mengembangkan usahatani masyarakat menjadi hutan rakyat maupun hutan kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan fungsi dinas kehutanan dalam menyebarluaskan program pembangunan kehutanan yang sedang dilakukan, dengan adanya dana PMDH yang cukup besar untuk membina masyarakat.



Gambar 2. Tugu Pelaksanaan PMDH PT. Tunas Sawa Erma, Kabupaten Bovendigul

Tabel 7. Kegiatan Menciptaan Kesadaran dan Perilaku Positif dalam Pelestarian SDA

No.	Kegiatan	A	B	C	D	E	F	Keterangan
I.	2. Pengembangan Hutan Rakyat, aneka usaha kehutanan, hutan kemasyarakatan dan pelestarian SDA							
	a. Penyiapan Lahan			V	V			
	b. Penyiapan Bibit			V	V			
	c. Penanaman			V	V			
	d. Lain-lain							

Sumber : Data Primer dari Sample HPH di Papua, 2006

Keterangan :

A. PT. Arfak Indra, Fak-fak Irian Jaya Barat

B. PT. Korindo Grup, Bovendigul Papua

C. PT. Hanurata, Raja Ampat Irian Jaya Barat

D. PT. Wapoga Mutiara Timber, Sarmi Papua

E. PT. Centrico, Kaimana Irian Jaya Barat

F. PT. Wukirasari, Teluk Bintuni, Irian Jaya Barat

Dalam pelaksanaannya kegiatan penyuluhan dan sosialisai produk hukum bagi masyarakat sekitar hutan tidak pernah dilakukan oleh pihak dinas kehutanan ataupun pihak terkait lainnya. Upaya peningkatan kesadaran dan perilaku positif dilakukan oleh HPH sebatas pemberian motivasi kerja dan perlindungan sumber daya alam melalui pertemuan-pertemuan informal antara staff bina hutan dengan kepala kampung untuk diteruskan di tingkat masyarakat. Bentuk sosialisasi semacam ini sangat tidak efektif. Kondisi ini terlihat pada kegiatan pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan yang belum berjalan. Beberapa HPH, saat ini telah melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan pengayaan dan reboisasi. Diharapkan masyarakat akan giat menanam di hutan *ulayat* berdasarkan hak marga yang ada. Bentuk pelibatan ini dilakukan agar masyarakat merasa memiliki tanaman tersebut sehingga mampu menjaga dan merawatnya. Kegiatan ini sudah mulai digalakkan pada PT. Hanurata dan PT. Wapoga Mutiara Timber sejak tahun 2005, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reboisasi, maka kegiatan ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

### C. Kontribusi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat

Pemanfaatan hutan di Papua selain dibebani dengan pelaksanaan TPTI yang optimal, juga memiliki kontribusi kepada masyarakat yang dikenal dengan dana kompensasi hak ulayat serta dana Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan (PMDH).

Pelaksanaan Dana kompensasi hak ulayat berdasarkan SK Gubernur telah dilakukan sejak tahun 2001. Mengacu pada SK Gubernur Papua No 50 tahun 2001, besar kompensasi hak *ulayat* atas kayu yang dipungut pada arel hak ulayat di propinsi Papua untuk jenis merbau Rp. 25.000/m<sup>3</sup> dan jenis kayu campuran Rp.10.000/m<sup>3</sup>. Sejak tahun 2004, pelaksanaan dana kompensasi mengacu pada SK Gubernur Papua No. 184 tahun 2004, dimana jenis kayu merbau Rp. 50.000/m<sup>3</sup> dan kayu *mix* Rp. 10.000/m<sup>3</sup>. Dana kompensasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hutan sebagai pengganti menurunnya kualitas hutan dan hilangnya akses dengan hutan sebagai lapangan kerja, sebagai dampak eksploitasi kegiatan perusahaan hutan. Pembayaran biaya kompensasi dilakukan di blok terbangun/*base camp* dalam bentuk uang tunai dan disaksikan oleh MUSPIKA serta instansi terkait.

Pelaksanaan PMDH mengacu pada SK 523/Kpts-II/1997 dengan satuan biaya Rp. 1000/m<sup>3</sup> yang di hitung berdasarkan hasil terbangun 2 (dua) tahun sebelumnya. Tabel berikut merupakan nilai rupiah yang telah di serahkan HPH sebagai dana kompensasi dan PMDH selama 5 tahun terakhir (2000-2005).

Tabel 8. Dana Kompensasi Hak Ulayat dan PMDH

No.	Nama Perusahaan	Dana Kompensasi (Rp/thn)	Dana PMDH (Rp/thn)
1.	PT. Wukirasari, Teluk Bintuni	628.841.550	26.909.460
2.	PT. Tunas Sawaerna, Merauke	1.189.422.577	94.898.803
3.	PT. Bade Makmur Orisa, Merauke	863.299.853	129.504.724
4.	PT. Centrico Unit II Kaimana	1.181.669.840	24.268.660
5.	PT. Bumwi, Teluk Bintuni*)	61.530.637	119.791.678
	<b>Total</b>	<b>3.924.764.457</b>	<b>395.373.325</b>
	<b>Rata-rata/HPH</b>	<b>784.952.891</b>	<b>79.074.665</b>

Sumber : Data Primer dari Sample HPH di Papua, 2006

<sup>\*)</sup> Innah, Henry Silka, 2005

Berdasarkan Tabel 4 masing-masing HPH rata-rata mengeluarkan dana kompensasi Rp. 784.952.891/tahun dan dana PMDH sebesar Rp. 79.074.665/tahun. Dana kompensasi tersebut di serahkan kepada kepala kampung, yang kemudian di bagikan kepada seluruh jiwa yang ada di kampung tersebut. Irma Yeny, dkk. (2006) menyebutkan rata-rata penduduk yang menerima kompensasi tiap HPH sebesar 1.499 jiwa dengan rata-rata jumlah jiwa tiap KK sebanyak 4 Jiwa. Nilai uang tunai yang di terima lebih kurang Rp. 523.651/jiwa/tahun atau Rp.2.094.604/kk/tahun.

Innah, Henry Silka (2005) mengungkapkan bahwa dana PMDH PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries/PT. BUMWI sebagian diarahkan dalam bentuk beasiswa (pengembangan sumber daya manusia). Kontribusi kepada masyarakat selain melalui PMDH ialah kompensasi hak ulayat dan “aturan ketuk pintu”. Ketuk pintu diklaim sebagai syarat adat oleh masyarakat setempat, yang mana bila tidak dipenuhi, akan mengakibatkan tidak diijinkannya perusahaan beroperasi di wilayah dimaksud ataupun kalau dipaksakan akan menimbulkan kendala-kendala yang lebih besar pada perusahaan di kemudian hari. Aturan ketuk pintu tidak seragam diterapkan pada seluruh marga, dan belum ada standar yang baku. Besar dan bentuk ketuk pintu bisa berbentuk uang dan barang.

Distribusi pemanfaatan dana tersebut beragam berdasarkan besar kecilnya rupiah yang diterima. Masyarakat yang memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan primer berupa (sandang, pangan dan papan) dan sekunder sebesar 75%, sedangkan yang memanfaatkan untuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier (TV, Kendaraan, dan renovasi rumah serta bersenang-senang) hanya 25%. Masyarakat yang mampu mengalokasikan dana untuk kebutuhan tersier umumnya kepala kampung dan masyarakat yang menerima kompensasi relatif besar sebagai akibat jumlah produksi kayu tinggi sedangkan jiwa yang ada dalam satu kampung sangat sedikit.

#### **D. Kontribusi Perusahaan Melalui Kegiatan Pembinaan.**

Dalam menilai kontribusi perusahaan melalui kegiatan pembinaan dengan model PMDH dan kompensasi hak *ulayat* maka diperlukan data penerimaan masyarakat dan penyerapan/peluang tenaga kerja di wilayah tersebut. Hasil penelitian di beberapa kampung yang merupakan sasaran pemberdayaan masyarakat oleh HPH terlihat besar penerimaan seperti tertuang dalam Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan adanya perbedaan jumlah penerimaan kepala keluarga kampung yang menjadi binaan dan kampung bukan binaan, yaitu penerimaan kampung binaan lebih besar (Rp. 1.456.172/bln) dan dibandingkan desa bukan binaan (Rp. 1.126.183). Kondisi ini disebabkan kepala keluarga bukan binaan tidak mendapatkan dana kompensasi seperti kampung binaan. Namun jika dilihat dari roda ekonomi, maka terlihat kampung bukan binaan masih lebih maju dibandingkan kampung binaan. Hal ini disebabkan kampung bukan binaan terletak jauh dari hutan dan mendiami lahan konversi dan lahan transmigrasi, sehingga senantiasa memanfaatkan lahan tersebut secara optimal untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di wilayah konsesi HPH tidak melakukan kegiatan pemanfaatan lahan secara optimal, terlebih dukungan kebijakan pemerintah mengenai pembayaran kompensasi hak atas tanah yang di konversi oleh HPH memberikan disinsentif bagi masyarakat untuk mandiri. Masyarakat berusaha mengklaim kebijakan tersebut untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang cash. Bahkan kebijakan tersebut, oleh masyarakat tarifnya dianggap terlalu rendah dan harus dinaikkan.



Tabel 9. Penerimaan Kepala Keluarga Berdasarkan Sumber Penerimaan

Lokasi	Sumber Penerimaan tiap bulan				
	Hasil Hutan dan Laut (Rp)	Pertanian (Rp)	Jasa Perdagangan (Rp.)	Upah Karyawan HPH/ Dana Kompensasi	Jumlah (Rp)
<b>Desa Binaan</b>					
A	416.666	256.666	466.666	283.583	1.423.581
B	824.000	500.000	-	214.767	1.538.767
C	1.320.000	453.333	-	161.075	1.934.408
D	92.500	487.333	133.333	214.767	927.933
Rata-rata/bln					1.456.172
<b>Desa Bukan Binaan</b>					
A	28.333	300.000	143.000	22.917	494.250
B	368.000	200.000	-	20.833	588.833
C	1.110.200	590.400	67.466	86.556	1.854.622
D	540.000	430.133	13.333	7.083	990.549
Rata-rata/bln					982.063

Sumber : Data Primer dari Sample HPH di Papua, 2005

Keterangan : A: PT. Arfak Indra di Fakfak, Irian Jaya Barat  
 B: PT. Korindo grup  
 C: PT. Wapoga Mutiara Timbers di Sarmi, Papua  
 D: PT. Hanurata di P. Salawati, Irian Jaya Barat

Pendapatan perkapita kampung yang menjadi sasaran pembinaan sebesar Rp.1.040.049,75/tahun atau Rp.86.670/bln lebih kecil dari upah minimum regional propinsi Papua (Rp. 650.000). Upah regional minimum (UMR) merupakan standar kelayakan pendapatan yang diterima dalam satu bulan oleh para pekerja terstruktur di Papua. Rendahnya jumlah penerimaan disebabkan semakin sulitnya penduduk mendapatkan hasil meramu (berburu dan nelayan) sebagai sumber pendapatan terbesar. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan hasil buruan masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama sebagai akibat semakin jauhnya sumber buruan dan sebagai dampak eksploitasi hutan. Hasil tersebut menjadi tidak produktif lagi. Namun demikian rendahnya pendapatan penduduk tidak serta merta membuat mereka tidak dapat hidup. Hal ini disebabkan perhitungan pendapatan hanya pada uang *cash* yang di terima tiap bulannya melalui penjualan hasil usahatani maupun jasa yang dikeluarkan. Sedangkan hasil usahatani yang dimakan langsung, dan jasa yang digunakan tetapi tidak menghasilkan uang cash, tidak dihitung dalam penelitian ini. Oleh karena itu, walaupun jumlah pendapatan rendah, penduduk di desa mampu mencukupi kebutuhan bulannya selama hasil kebunnya dapat dimakan (tidak musim kemarau).

Serapan tenaga kerja di lokasi penelitian terlihat pada Tabel 6.

Tabel. 10. Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Asal Daerah

No.	Nama Perusahaan	Status			Persentase	
		Luar Papua	Lokal Papua	Jumlah	Luar Papua	Lokal Papua
1.	PT. Korindo grup	2389	806	3195	74,77	25,23
2.	PT. Wapoga Mutiara Timber Camp. Ingge	27	54	81	33,33	66,67
3.	PT. Wukirasari Camp. Wagura	145	36	181	80,11	19,89
	Rata-rata	2561	896	3457	62,74	37,26

Dari Tabel 5 diketahui 62,74% tenaga kerja di HPH contoh merupakan penduduk luar Papua, sedangkan 37,26% merupakan penduduk asli Papua. Rendahnya jumlah tenaga kerja asli Papua di sektor pengusahaan hutan terjadi karena lemahnya ketrampilan masyarakat itu sendiri. Alhamid dan Achmad Rizal (1997) menyebutkan, rendahnya serapan tenaga kerja oleh HPH tersebut diduga disebabkan oleh : 1) Tingkat ketrampilan masyarakat yang rendah dan cenderung homogen, sehingga hanya digunakan sebagai penebang pohon, penebas dan pekerjaan fisik tanpa mesin dan 2) pola kerja masyarakat yang tidak kontinu, dimana setelah bekerja sebulan, diselingi istirahat selama waktu yang tidak menentu (1-2 bulan), setelah itu melamar untuk bekerja kembali. Namun demikian HPH secara tidak langsung merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Hal ini diungkapkan kepala personalia PT. Tunas Sawaerna yang akan membutuhkan 4.000 jiwa tenaga kerja yang akan menunjang unit IPK.

Terbukanya lapangan pekerjaan di masing-masing HPH menunjukkan semakin baiknya pelaksanaan pemberdayaan dengan pola HPH. Namun kesempatan kerja tersebut belum diminati tenaga asal Papua. Jika dilakukan analisa efektifitas pelaksanaan PMDH dengan peta hubungan, maka akan tampak membentuk peta hubungan (2) Penyerapan tenaga kerja Rendah X Pendapatan Rendah (belum efektif). Di sini tampak bahwa pola PMDH belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Masyarakat Papua lebih senang menjadi pegawai negeri ataupun pekerjaan lainnya yang ada di daerah kota.

Kondisi ini bertolakbelakang dengan jika dilihat dari sisi lainnya seperti biaya sosial yang telah dikeluarkan HPH (Tabel 3), serta jumlah lapangan kerja yang tersedia (Tabel 5) dan adanya kebijakan untuk memprioritaskan tenaga kerja asli daerah, dimana HPH sudah mampu mengkomodir masalah pemberdayaan masyarakat.

Oleh karean itu, keberhasilan pola tersebut tidak terlepas pola hidup masyarakat asli Papua. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Papua perlu untuk memanfaatkan peluang yang ada. Untuk dapat meningkatkan kemandirian masyarakat diperlukan komitmen yang tinggi dari perusahaan dan instansi terkait untuk membina masyarakat sekitar hutan. Pola PMDH yang didukung oleh tenaga teknis perusahaan, dapat mengatasi sebagian besar kelemahan yang terdapat pada masyarakat sekitar hutan, misalnya, pada kegiatan pembinaan yang sangat dibutuhkan, khususnya, dalam hal peningkatan ketrampilan penduduk dibidang pertanian menetap, peternakan maupun pertukangan. Pelaksanaan SK Menhut tentang *social forestry* dan mencabut pelaksanaan PMDH, membuat semakin lemahnya posisi masyarakat sekitar



hutan dalam membangun dirinya. *Social forestry* yang diharapkan terbentuk, merupakan bentuk pengelolaan hutan secara kecil oleh masyarakat yang pada akhirnya dapat mengelola hutan secara lestari. Hal ini masih sangat tidak realistis, mengingat kemampuan managerial masyarakat yang masih rendah dan masih jauh dari katagori sejahtera. Ketidaksejahteraan masyarakat dapat merupakan bahaya laten akan kelestarian hutan. Oleh karena itu, pemberdayaan dengan pola PMDH masih perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen moral HPH terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pola PMDH mampu mengakomodir keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan di Papua, terutama dengan adanya tenaga bina desa yang berfungsi mendampingi masyarakat. Namun pelaksanaan PMDH di Papua masih terkesan merupakan bantuan fisik dan bersifar *sporadic*. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan masyarakat desa binaan dalam merencanakan program pembinaan di desa, dan kurangnya tenaga teknis bina desa, serta lemahnya komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.
2. Kehadiran HPH harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat mengingat 93,29% adalah petani peramu yang masih membutuhkan pendampingan ke arah pertanian menetap, dengan tetap melaksanakan pola PMDH, sesuai dengan karakteristik wilayah, serta pemberian dana kompensasi dengan besaran yang perlu diperhitungkan kembali, mengingat nilai uang tunai yang diterima masih lebih kecil dari UMR yang ditetapkan di Papua (Rp. 650.000).

### **B. SARAN**

Pelaksanaan Kepmen 177/Kpts-II/2003 tentang kriteria dan indikator usaha pengelolaan hutan secara lestari, pada unit manajemen usaha pemanfaatan hutan tanaman tentang...., harus didukung dengan kegiatan sosialisasi dan integrasi program dengan instansi terkait/LSM yang telah bekerja di sekitar lokasi IUPHHK mengingat IUPHHK tidak dapat mengambil alih semua tugas pemberdayaan masyarakat yang tegas dan tanggungjawabnya perlu disesuaikan dengan porsinya masing-masing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Tuharea, Achmad Rizal dan Ifhendri. 2001. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Produksi (Studi kasus di PT. Risana Indah Forest Industries). Buletin Penelitian No.
- Astana, S. 2003. Usulan Kegiatan Penelitian (UKP) Kajian Pengentasan Illegal Logging. Badan Litbang Kehutanan.
- Anonimous, 2003. Mengurangi Polusi dalam Pemantauan Lingkungan Indonesia. Tahun 2003. The Word Bank.
- Badan Litbang Kehutanan, 2003. Pedoman Penyusunan Proposal UKP, PPTP, RPTP. Tidak diterbitkan.

- Departemen Kehutanan, 1998. Petunjuk Survey Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia.
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua. 2001. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya Tahun 2001- 2005. (tidak diterbitkan).
- Effendi Rachman. 2003. Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP) Kajian Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi dalam Mencegah Illegal Logging.
- Harry Hikmat. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama. Bandung.
- Hidayat Alhamid dan Achmad Rizal. 1997. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan di Irian Jaya; *Sosio-eko-kultur HPH Bina Desa Hutan*. Proseding.
- Innah, Henry Silka. 2005. Model *System Dynamics* Pemanfaatan Hutan *Mangrove* (Kasus: IUPHHK *Mangrove* Di Teluk Bintuni Papua). Tesis Magister Program Studi Pembangunan ITB, Bandung. (*Unpublished*).
- Irma Yeny, dkk. 2006. Kajian Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Alam di Papua. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Tidak diterbitkan.
- Soeharto Prawirokusuma. 2001. Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi). BPFE Yogyakarta.

Lampiran 1. Karakteristik Responden

No.	Kabupaten Contoh/ Desa Contoh	Umur (tahun)			Pendidikan				Jenis Kelamin		Suku	Agama	Jumlah Responden
		18-30	31-49	>50	TS	SD	SMP	SMA	L	P			
1	<i>Kabupaten Fak-fak</i> Desa Metimbers SP 5	7 10	5 3	3 2	0 0	9 5	4 7	2 3	12 14	3 1	Baham Jawa	Islam Islam	15 15
2	<i>Kabupaten Raja Ampat</i> Desa Sakabu Desa Sumate Desa Kapatlap Desa Kalobo	7 2 3 11	6 5 6 3	2 8 6 1	5 9 1 0	5 3 6 4	4 3 5 9	1 0 3 2	15 15 15 13	0 0 0 2	Raja ampat Raja ampat Raja ampat Java & Makasar	Protestan Protestan Protestan Islam	15 15 15 15
3	<i>Kabupaten Boven digul</i> Desa Getentiri Desa Aiwar Desa Butiptiri Desa Anggai	10 4 7 4	3 7 6 8	2 4 2 3	0 0 2 6	5 5 6 5	5 7 4 3	5 3 3 1	14 15 15 15	1 0 0 0	Muyu Muyu Muyu Muyu	Katolik Protestan Katolik Katolik	15 15 15 15
4	<i>Kabupaten Kaimana</i> Desa Urubika	6	7	2	2	3	8	2	15	0	Windesi	Protestan	15
5	<i>Kabupaten Teluk Bintuni</i> Desa Wagura I	4	9	2	2	7	5	1	14	0	Babo	Protestan	15
6	<i>Kabupaten Sarmi</i> Desa Tarawasimaringgi Desa Anus	5 6	8 6	2 3	0 2	6 9	6 4	3 0	14 15	1 0	Baham Armopa	Protestan Protestan	15 15